



# Sultan: Perbaiki Kerusakan Malioboro

## ■ Peran Badan Pengawas Harus Maksimal

### JAGA MALIOBORO

- Sri Sultan HB X meminta masyarakat menjaga wajah Malioboro.
- Sejumlah fasilitas pedestrian Malioboro rusak padahal belum lama diresmikan.
- Ditengarai ada unsur kesengajaan pada beberapa kerusakan itu.

**YOGYA, TRIBUN** - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti kerusakan di jalur pedestrian Malioboro. Dia meminta penggarap proyek bisa membenahi dan pada saat diserahkan atau diresmikan sesuai dengan kontrak.

"Kerusakan ini biasa karena banyak orang. Yang penting nanti pada saat diserahkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak," kata Sri Sultan HB X di kompleks Kepatihan, Kamis (22/11).

● ke halaman 19

## Sultan: Perbaiki Kerusakan

• Sambungan Hal 13

Menurut Sultan, perbaikan untuk berbagai kerusakan itu memang harus segera dilakukan. Selain itu, nantinya peran badan pengawas harus diperkuat agar bisa melakukan pengawasan secara maksimal. "Badan pengawas ini harus diperkuat tidak hanya kota (pemkot) tetapi provinsi (Pemda DIY) juga ada di situ, supaya kami bisa membantu dalam penganggaran," ujar Sultan.

Sejumlah fasilitas yang diketahui mengalami kerusakan adalah jalur khusus difabel. Di bagian pelat logam timbul untuk penanda jalur tersebut sudah terlihat beberapa yang copot. Kerusakan ini terlihat di sepanjang jalan dari DPRD DIY hingga kawasan Kantor Gubernur DIY.

Selain jalur khusus difabel, tiang *bolard* tabung untuk pembatas jalan pun sudah mengalami kerusakan. Kerusakan ini di antaranya adalah keretakan pada bagian konstruksinya. Selain itu, beberapa bagian sudah robek diduga karena terta-

brak benda.

Beberapa pilar pembatas jalan yang difungsikan untuk melarang parkir di kawasan pedestrian ini mengalami penyok di bagian atasnya. Di antaranya, kerusakan parah ini terlihat di depan pintu masuk gedung DPRD DIY, ada empat pilar yang mengalami kerusakan. Selain itu juga di dekat pintu masuk Dinas Pariwisata yang juga mengalami kerusakan serupa.

### Hukum

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo menjelaskan, kerusakan fasilitas di kawasan tersebut perlu diselidiki dan ditindaklanjuti dengan proses hukum. Jika memang sengaja dirusak atau diserempet sehingga menyebabkan rusak harus ditangkap pelakunya.

Budi menjelaskan, jika memang ada pelanggaran dan pelakunya bisa ditangkap maka harus ada proses hukum. Proses hukum dan sanksi ini akan membuat jera para pelaku yang telah dengan sengaja merusak fasilitas umum ini.

Di samping itu, nantinya pada tahun 2019 akan dibentuk badan pengelola

kawasan sumbu filosofis. Badan pengelola ini akan mengawasi kawasan dari Tugu Pal Putih, Malioboro hingga titik nol. Anggotanya pun berasal dari multisektoral yang akan mengawasi berbagai macam hal. "Ada dari pariwisata, kesehatan, lingkungan hidup, budaya dan lainnya. Namun, ini masih menunggu penetapan sumbu filosofis sebagai warisan dunia," jelasnya.

Senada dengan Buti, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, kerusakan di Malioboro pun harus diselidiki apakah lantaran faktor kesengajaan atau memang bukan kesengajaan. Pihaknya mempercayakan pengelolaan Malioboro sejauh ini melalui Pemkot Yogya.

Gatot juga menambahkan, kawasan Malioboro yang terjaga adalah tugas masyarakat dan bukan hanya pemerintah. Pihaknya pun meminta masyarakat aktif untuk menjaga kawasan Malioboro. "Sebagai ikon wisata di DIY, keterawatan fasilitas menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat ikut mengawasi dan jangan hanya dibebankan pada pemerintah," imbuhnya. (ais)



TRIBUN JOGJA/AGUNG ISMIYANTO

**RUSAK** - Jalur difabel di kawasan pedestrian Malioboro terlihat rusak, kemarin. Selain jalur khusus difabel, tiang *bolard* pembatas jalan pun rusak. Seperti keretakan pada bagian konstruksinya.

## Toko Pun Rela Mundur

**KETUA** Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), Budhi Susilo, berharap wajah Malioboro tidak rusak dan pedestrian bisa diterapkan dengan baik. Para pemilik toko di kawasan Malioboro pun sudah merelakan mundur empat hingga lima meter agar tanah mereka bisa digunakan sebagai pedestrian.

"Dalam sejarahnya, toko disuruh mundur tanpa ganti rugi hingga 4 sampai 5 meter untuk pejalan kaki dan kenyamanan. Maka, kempa-

likan wajah Malioboro seperti janji mantan Wali Kota Yogyakarta, Sujono," kata pria yang akrab disapa Cuncun ini kepada *Tribun Jogja*, Kamis (22/11).

Menurutnya, sebagai jalan Malioboro yang berarti jalan untaiian sejuta bunga dan Malioboro yang berarti kemuliaan melalui keheningan, seharusnya dikembalikan suasana itu. Namun, saat ini justru dipenuhi dengan para

● ke halaman 19

### Toko Pun Rela Mundur

● Sambungan Hal 13

pedagang kaki lima (PKL).  
Jika PKL dimaksudkan se-

bagai ikon Yogyakarta, Cuncun juga menilai pemilik toko seharusnya yang menjadi PKL. Hal ini karena para PKL menempati lahan mereka dan bisa dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki.

Pihaknya pun meminta ja-

garan Pemkot Yogyakarta untuk bertanggung jawab dengan kenyamanan kawasan ini. Pihaknya pun mendasarkan penataan PKL itu dengan Perwal 37 tahun 2010. Sehingga, penataan itu harus dilakukan. (ais)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005